

PEMAHAMAN ETIKA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA EKSEKUTIF DALAM POLITIK ISLAM

Mulla Sadra¹, A. Wahyudi², Kurniati³

^{1,2}, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200122097@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122081@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Etika politik dan moral kepemimpinan, baik dalam konteks Islam maupun di luar Islam, sangat dipengaruhi oleh sikap dan tindakan penguasa. Pemerintahan yang adil dan berdasarkan nilai-nilai etika penting untuk dipelajari dari pengalaman nyata dan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan guna menciptakan kedamaian. Namun, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai penerapan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan etika politik dan moral dalam kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang menanamkan nilai-nilai etika dan moral berhasil menciptakan suasana kebahagiaan bagi rakyatnya, sedangkan pemimpin yang mengabaikan nilai-nilai tersebut mengalami keruntuhan kekuasaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan dapat mencegah kekacauan dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai etika dan moral dalam pendidikan kepemimpinan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan damai.

Kata kunci: Etika Kepemimpinan; Keadilan; Kepemimpinan Moral; Stabilitas Pemerintahan

Abstract

The political and moral ethics of leadership, both in the Islamic context and outside of Islam, are greatly influenced by the attitudes and actions of those in power. A government that is just and based on ethical values is important to learn from real experience and is based on the principles of justice in order to create peace. However, there is a knowledge gap regarding the application of ethical values in leadership which can cause government instability. This research uses qualitative methods with a case study approach to analyze the application of political and moral ethics in leadership. The research results show that leaders who instill ethical and moral values succeed in creating an atmosphere of happiness for their people, while leaders who ignore these values experience a collapse in power. In addition, this research found that applying ethical values in leadership can prevent chaos and increase government stability. The implications of this research show the importance of strengthening ethical and moral values in leadership education to create a just and peaceful government.

Keywords: Leadership Ethics; Justice; Moral Leadership; Government Stability

PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia, umat Islam menghadapi berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis kepercayaan, krisis politik, dan lainnya. Semua ini berawal dari krisis moral pemimpin bangsa, yang kemudian diikuti oleh kehancuran moral rakyat. Ketika pemimpin gagal menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika yang tinggi, dampaknya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tak heran jika di negara-negara yang mengalami krisis, banyak terjadi kejahatan seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan tindakan asusila. Hal ini menunjukkan bahwa moral dan etika pemimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kesejahteraan negara. Pemimpin yang tidak bermoral cenderung

menciptakan lingkungan yang memungkinkan berbagai bentuk kejahatan berkembang pesat, merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat (Muhyiddin, 2020).

Ketika pemerintah sudah jauh dari nilai-nilai etika, negara tersebut dipastikan akan mengalami kehancuran. Pemerintah yang tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat akan menjadikan rakyat sebagai korban. Mereka menjadi apatis terhadap rakyat dan gagal menjaga persatuan serta kesatuan. Ketika pemimpin kehilangan kompas moral, kebijakan yang diambil sering kali hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan mayoritas rakyat. Rakyat yang merasa tidak lagi dipedulikan oleh pemimpin mereka akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat terhadap pemerintah. Hal ini berakibat pada meningkatnya ketidakpuasan dan ketegangan sosial, yang bisa memicu konflik internal dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, hilangnya nilai-nilai etika dalam pemerintahan akan mendorong budaya korupsi dan nepotisme, yang semakin memperburuk keadaan ekonomi dan memperlemah institusi-institusi negara. Pada akhirnya, negara yang gagal menjaga etika dan moral dalam pemerintahan akan menghadapi kehancuran sistemik yang meluas, di mana rakyat menderita akibat ketidakadilan, ketidakstabilan, dan kurangnya perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.

Mencintai dan berbuat baik terhadap rakyat adalah nilai etika yang terpuji dalam Islam, dan seorang kepala negara yang memiliki sifat-sifat ini akan menjadi pemimpin yang dibanggakan. Sebaliknya, sifat membenci rakyat, menjauh dari rakyat, serta mempertahankan sikap egois dan sombong adalah tanda moral yang tercela, yang membuat pemimpin tidak disukai oleh rakyat (Ahmad, 2020). Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya akan berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta bekerja keras untuk menciptakan kebijakan yang adil dan menguntungkan semua lapisan masyarakat. Pemimpin yang demikian akan mendapatkan dukungan dan rasa hormat dari rakyatnya, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahannya. Di sisi lain, pemimpin yang mengabaikan rakyat, memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompoknya, dan menunjukkan sikap arogan akan kehilangan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Pemimpin seperti ini sering kali terjebak dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi negara (Alamari, 2020). Ketika rakyat merasa diabaikan dan tidak dihargai, mereka cenderung menjadi apatis atau bahkan memberontak, menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan berbuat baik kepada mereka tidak hanya memenuhi ajaran moral dan etika Islam, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahannya dapat berjalan dengan efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Selain pemerintah, rakyat juga harus memiliki etika dan moral yang baik. Ali bin Abi Thalib dalam pidatonya kepada pengikutnya mengatakan bahwa musuh-musuh mereka bisa menang karena mereka bersatu dalam kesesatan, sementara rakyatnya terpecah belah dalam kebenaran. Ini menegaskan pentingnya persatuan dan integritas moral di kalangan rakyat.

Ketika rakyat memiliki etika dan moral yang kuat, mereka akan lebih mampu bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, tanpa etika dan moral yang baik, masyarakat akan mudah terpecah belah dan rentan terhadap manipulasi, korupsi, dan konflik internal (Illahi, 2019). Ketidakmampuan untuk bersatu dalam kebenaran dapat melemahkan kekuatan kolektif rakyat dan membuat mereka mudah dikalahkan oleh kekuatan yang, meskipun salah, tetap bersatu dan kuat. Rakyat yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan lebih kritis terhadap kebijakan yang tidak adil dan akan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang merusak, dan akan berusaha menjaga integritas sosial dan politik negara mereka. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil, baik pemimpin maupun rakyat harus berkomitmen pada etika dan moral yang tinggi, saling mendukung dalam kebenaran, dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Penguasa yang adil adalah penguasa yang bertindak adil di antara manusia dan menahan diri dari perbuatan jahat dan serakah. Penguasa yang demikian memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka berusaha untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, penguasa yang zalim adalah penguasa yang kejam dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak adil dan merugikan rakyat. Kekuasaan yang didasarkan pada penindasan dan ketidakadilan tidak akan bertahan lama karena akan menimbulkan perlawanan dari rakyat yang merasa tertindas. Kelanggengan sebuah pemerintahan hanya bisa tercapai melalui perilaku baik terhadap rakyat dan pemeliharaan urusan bersama, karena rakyat yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil akan mendukung pemimpinnya dengan penuh kepercayaan dan loyalitas (Ambartiasari et al., 2017). Penguasa yang adil akan menciptakan lingkungan di mana kepercayaan publik terjaga, stabilitas sosial terjamin, dan kemakmuran bersama dapat dicapai. Dengan kata lain, keadilan adalah fondasi dari kekuasaan yang berkelanjutan, dan tanpa keadilan, kekuasaan akan rapuh dan mudah runtuh.

Kemakmuran dan keruntuhan dunia bergantung pada penguasa. Jika penguasa adil, dunia akan makmur dan rakyat akan merasa aman (Al-Ghazali & Al-Muluk, 2021). Penguasa yang adil menegakkan hukum dengan tegas namun bijaksana, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi. Mereka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya keadilan, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, investasi asing dan domestik bertambah, serta inovasi dan kreativitas berkembang karena rakyat merasa didukung dan dilindungi. Selain itu, penguasa yang adil juga berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, dengan menjalankan diplomasi yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sebaliknya, ketika penguasa bersikap zalim dan sewenang-wenang, rakyat akan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan. Ketidakadilan mengarah pada ketidakpuasan, pemberontakan, dan bahkan konflik berskala besar yang dapat meruntuhkan tatanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penguasa yang adil bukan hanya membawa kemakmuran bagi negaranya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran global, menjadikan keadilan sebagai kunci utama dalam memelihara kedamaian dan kesejahteraan dunia.

Salah satu penyebab meningkatnya kebobrokan etika dan moral suatu bangsa adalah karena penganutnya tidak menjalankan agamanya dengan baik. Setiap agama mengajarkan kebenaran, sehingga kebobrokan etika suatu bangsa tidak boleh menyalahkan agama. Agama adalah faktor penting dalam moral bangsa, namun yang harus disalahkan adalah penganut agama yang tidak menjalankan ajarannya dengan baik (Khathab, 2022). Dari agama lahir nilai-nilai iman, dan dengan iman yang tertanam, akan lahir etika dan moral yang tinggi. Ketika penganut agama benar-benar mengamalkan ajarannya, mereka akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang diajarkan oleh agama. Hal ini akan tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kepribadian yang baik, aparatur pemerintah dapat dibina untuk membangun komitmen moral yang lebih spesifik dalam mentaati nilai-nilai etika profesi. Aparatur yang memiliki dasar moral yang kuat akan lebih mampu menolak godaan untuk melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta lebih berkomitmen untuk melayani rakyat dengan integritas dan dedikasi. Selain itu, ketika nilai-nilai agama benar-benar dihayati dan diamalkan, masyarakat secara keseluruhan akan lebih bersatu dalam menghadapi tantangan dan lebih mampu menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, pembinaan moral melalui agama harus menjadi prioritas, baik di tingkat individu maupun institusi, untuk membangun bangsa yang bermoral tinggi dan etis (Ali, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis etika politik dan moral kepemimpinan dalam konteks Islam dan non-Islam melalui kajian literatur. Sumber Primer menggunakan Buku klasik tentang etika politik dan kepemimpinan. Sumber Sekunder: Artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan dan Sumber Tersier: Ensiklopedia dan referensi umum. Teknik pengumpulan data menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR dan mengumpulkan dan menyimpan literatur yang relevan. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama. Menyusun literatur secara sistematis. Analisis Konten: menganalisis konten untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dan moral. Validasi Data menggunakan triangulasi sumber: Membandingkan informasi dari berbagai sumber dan meninjau temuan dan analisis dengan rekan sejawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika adalah ilmu yang bersifat reflektif dan kritis (Susena, 2001). Etika bukanlah tambahan untuk ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis yang

mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu, bukan sebuah ajaran, sehingga etika dan moral tidak berada pada tingkat yang sama. Ajaran moral dapat diibaratkan sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pemahaman mengenai struktur dan teknologi sepeda motor. Moral berusaha menjawab pertanyaan “apa yang harus saya lakukan”, sementara etika berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik”.

Kata politik berasal dari bahasa Inggris "politic" yang menunjukkan sifat pribadi atau tindakan. Secara leksikal, kata sifat ini berarti bertindak atau menilai dengan bijak (acting or judging wisely). Kata ini diambil dari bahasa Latin "politicus", yang berarti berhubungan dengan warga negara (relating to citizens)(Salim, 2002). Politik juga berasal dari kata "polis" yang berarti negara kota di Yunani. Dengan demikian, secara etimologi atau harfiah, berbicara tentang politik adalah berbicara tentang negara. Deliar Noer menggunakan dua pendekatan dalam mendefinisikan politik: pertama, pendekatan yang menekankan nilai, dan kedua, pendekatan yang menekankan perilaku. Pendekatan ini mencakup pula nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menentukan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan, seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain menggunakan faktor-faktor sejarah. Menurut Deliar Noer (Noer, 1983), politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Etika dan Moral Kepemimpinan Islam

Para pemimpin dan elit politik di masa kini seringkali kehilangan kepercayaan rakyat bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap diri mereka sendiri. Rakyat merasa bertanya-tanya mengapa ekonomi terus merosot dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari semakin memburuk (Mubarak & Wiwoho, 2023). Di berbagai tempat, kerusakan mudah terjadi, dan tindakan main hakim sendiri serta pertikaian antar elit politik menjadi hal lumrah. Kondisi ini mengingatkan pada cerita *Oedipus* dalam mitologi Yunani yang menggambarkan nafsu berkuasa sebagai akar dari segala kejahatan, memicu pertikaian antara keluarga sendiri (Mubarak & Wiwoho, 2023). Konsep yang jelas mengenai sebuah negara yang berdasarkan akal budi dan moral keagamaan dijelaskan oleh Siti Agustine dalam bukunya "*Civitate Dei*" (Negara Tuhan), di mana ia memperlihatkan pertarungan antara moral baik dan moral buruk dalam kehidupan manusia. Peran pemimpin sangatlah penting dalam membentuk masyarakat, karena kerusakan rakyat dapat disebabkan oleh pemimpin yang korup dan pemimpin yang rusak juga akan merusak ulamanya. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, ulama harus menjaga fungsi mereka sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi, dan penegak keadilan politik. Mereka harus bersikap waspada dan tidak terlibat dalam politik zalim, bahkan jika perlu, mereka harus menjauhkan diri dari politik dan pemerintahan. Islam telah mengatur etika dan moral kepemimpinan dalam Alquran, hadis Nabi Muhammad, serta kesepakatan para ulama, di

mana inti dari semua ajaran tersebut adalah amanah dan keadilan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:90: (Departemen Agama, 2009)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemah Kemenag 2002

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keadilan dalam konteks ini mengacu pada pengambilan keputusan yang tidak memihak, di mana setiap individu, tanpa memandang agama, status, atau hubungan pribadi, berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum, bukan berdasarkan pertimbangan pribadi atau permusuhan. Masalah kepemimpinan saat ini dianggap krusial dalam membentuk negara dan masyarakat yang berakhlak. Struktur kejahatan sering kali berkaitan dengan politik kekuasaan, di mana perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius untuk mengatasi korupsi dan ketidakadilan (Mubarak & Wiwoho, 2023). Penggunaan kekuasaan seringkali tidak didasarkan pada etika politik, melainkan lebih untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Hal ini sering mengakibatkan pengorbanan tujuan politik yang seharusnya (yakni, kesejahteraan bersama) demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Etika dan moral kepemimpinan, baik dalam konteks Islam maupun di luar Islam, sangat dipengaruhi oleh perilaku penguasa. Oleh karena itu, siapa pun yang menginginkan pemerintahan yang adil dan didasarkan pada nilai etika, harus belajar dari realitas yang ada, termasuk memahami konsep-konsep etika politik yang telah diajukan oleh para ahli etika politik.

Etika Politik dalam Konsep Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani sejalan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam serta demokrasi, di mana masyarakat madani mengharapkan hal-hal berikut:

- a. Legislatif berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat, serta berupaya secara optimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.
- b. Yudikatif yang berintegritas, adil, dapat dipercaya, dan mampu memberlakukan sanksi yang adil kepada siapa pun tanpa memandang jabatan yang mereka pegang.
- c. Eksekutif yang berfungsi dengan baik, bersih, dan jujur dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat.
- d. Masyarakat diharapkan jujur dan berani dalam menyuarakan kebenaran serta mematuhi berbagai aturan yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Etika politik menurut Plato

Tercermin dalam konsep negara idealnya, di mana pemerintah bertugas untuk memenuhi kebutuhan warga negara dengan menetapkan tujuan negara yang sejalan dengan tujuan individu, yakni mencapai kesenangan dan kebahagiaan. Namun, teori politik Plato juga mengandung aspek larangan terhadap beberapa praktik, seperti memposisikan orang-orang yang kalah dalam perang sebagai budak yang tidak memiliki hak milik, hak berpendapat, atau hak politik di dalam negara (Sholeh, 2019).

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan pemegang kekuasaan dilarang untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apabila prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut tidak diterapkan dengan baik dan benar, maka akan timbul keterpurukan dalam etika dan moral para pemimpin, yang termanifestasi dalam beberapa hal sebagai berikut: Pertama, keterpurukan dalam etika dan moral pemimpin sering kali berhubungan dengan praktik korupsi, di mana pemimpin menjadi sangat ambisius dalam mencari kekayaan tanpa memperhatikan prinsip halal dan haram. Baharuddin Lopa mengungkapkan bahwa krisis moral telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sehingga cita-cita keadilan sebagai sumber ketentraman dan kesejahteraan di Indonesia belum tercapai dengan baik (Lopa, 2001). Sulitnya menegakkan hukum disebabkan sulitnya mengidentifikasi akar permasalahan moral, oleh karena itu, penting bagi para pejabat pengambil keputusan untuk memberikan teladan kepada bawahan mereka. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah/5:42 bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.

Kedua, keterpurukan dalam etika dan moral pemimpin juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama sebagai panduan dalam bertindak. Lemahnya pemahaman agama dapat membuat para pemimpin mengabaikan nilai-nilai etika dan moral, oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama mereka. Ketiga, keterpurukan dalam etika dan moral pemimpin bisa terjadi karena sikap sombong. Contohnya adalah kasus raja Namruz yang mengaku sebagai Tuhan dan menolak memberikan makanan kepada rakyat jika mereka tidak bersujud kepadanya. Sikap sombong ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinannya (Muslim, 1998). Keempat, kurangnya rasa tanggung jawab juga bisa menjadi penyebab keterpurukan dalam etika dan moral pemimpin. Kekuasaan bukanlah suatu kenikmatan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan secara jujur, baik di hadapan Allah maupun di hadapan rakyat (Anwar, 2000).

Kelima, kejujuran adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Tanpa kejujuran, nilai-nilai moral lainnya menjadi kurang berarti. Sikap baik kepada orang lain tanpa kejujuran adalah bentuk kemunafikan, dan sikap tenggang rasa tanpa kejujuran hanya akan menjadi tindakan berhati-hati tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki sikap jujur, karena tanpa kejujuran, segala tindakannya akan kehilangan nilai moralnya.

Alquran Sebagai Sumber Gagasan Etika Politik

Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Al-Quran digunakan sebagai landasan dalam membentuk konsep etika politik, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik. Dengan demikian, Al-Quran memberikan pengajaran mengenai etika dan moral, sebagaimana yang diungkapkan dalam Surah Al-Imran/3:159:(Departemen Agama, 2009)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemah Kemenag 2002

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai karakteristik etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari umat. Hal ini antara lain meliputi memiliki sifat yang lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberikan kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subjektif yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka orang akan menjauh dan tidak memberikan dukungan (Salim, 2002). Dalam sejarah, kaum Majusi memiliki penguasaan dunia selama empat ribu tahun. Kekalahan kekuasaan hanya bisa dihindari melalui perilaku yang adil terhadap rakyat dan pemeliharaan urusan bersama-sama. Mereka tidak memperbolehkan penindasan dalam urusan agama dan keyakinan mereka. Mereka mengurus negara mereka dengan adil dan juga memperlakukan manusia dengan adil. Dari sini dapat dipahami bahwa kemakmuran dan kehancuran dunia sangat tergantung pada penguasanya. Jika penguasa adil, dunia akan

makmur dan rakyat akan merasa aman, namun jika penguasa tidak adil, dunia akan mengalami kehancuran (Baasir, 2023).

Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan, Faisal Baasir menyatakan bahwa mengakar etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, yang memberikan cahaya dan arahan dalam kehidupan serta menjadi modal ketenangan jiwa sebelum seseorang mengambil tindakan tertentu. Salah satu prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konsep kekuasaan sebagai amanah. Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemah Kemenag 2002

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Makna esensi amanah adalah sebagai "titipan" atau "pesan". Dalam konteks demokrasi Islam, konsep amanah dipahami sebagai sebuah "karunia atau anugerah Allah yang merupakan bentuk pemeliharaan, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Al-Quran, dan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah (Baasir, 2023)." Seseorang yang bertanggung jawab diharapkan mempunyai rasa takut kepada Allah atas tugas yang diberikan kepadanya terkait urusan umat, agar dia selalu mengingat betapa besar tanggung jawab yang diberikan untuk menjalankannya. Al-Quran, sebagai sumber konsep etika politik, berupaya menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan pemerintahan yang berwibawa. Oleh karena itu, perilaku dan moralitas rakyat sangat dipengaruhi oleh kebijakan para pemimpin, karena moralitas rakyat adalah cerminan dari kepemimpinan yang ada. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang memiliki etika dan moral yang berasal dari nilai-nilai agama yang luhur. Dengan demikian, segala tindakan baik, adil, dan bertanggung jawab dari seorang pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama dia tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

SIMPULAN

Etika politik Islam selalu merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran, sebagai panduan utama, mengajak umatnya untuk bertindak dengan adil, berbuat baik, dan menjadi orang yang amanah. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, dengan harapan

menciptakan kedamaian yang berkelanjutan sesuai dengan norma-norma agama. Ketika segala aktivitas politik dilakukan dengan mematuhi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran, maka aktivitas tersebut akan mendapatkan berkah yang berlipat ganda, serta terhindar dari malapetaka yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (2020). *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*. Bulan Bintang.
- Al-Ghazali, I., & Al-Muluk, A.-T. A.-M. fi N. (2021). *Etika Berkuasa, Nasehat Imam Al-Ghazali*. Pustaka Hidayat.
- Alamari, M. F. (2020). Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(02), 254–277. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.237>
- Ali, F. (2020). *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokrasi dalam Islam Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ambartiasari, G., Rahman Lubis, A., & Chan, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Dan Fasilitas Kampus Terhadap Kepuasan Dan Dampaknya Kepada Loyalitas Mahasiswa Politeknik Indonesia Venezuela. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 8(3), 12–23.
- Anwar, M. T. (2000). *Fiqh Politik, Tinjauan Partai Politik Islam*. Studi Press.
- Baasir, F. (2023). *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Agama. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 136–152. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.136-152>
- Khathab, J. M. S. (2022). *Latar Belakang Kemenangan Islam*. CV. Pustaka Mantiq.
- Lopa, B. (2001). *Masalah-Masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan Agama, Sebuah Pemikiran (Cet. I; 2001)*, h. 67. Pustaka Sinar Harapan.
- Mubarak, A., & Wiwoho, B. (2023). *Etika dan Moral Kepemimpinan (Cet. I; 2023)*, h. PT. Bina Rena Pariwisata.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Muslim. (1998). *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka (Cet. I; 1998)*, h. 10. CV. Citra Pelajar.
- Noer, D. (1983). *Pengantar Pemikiran Politik*. Rajawali.
- Salim, A. M. (2002). *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sholeh, M. (2019). *Etika Politik Dan Kewarganegaraan Dalam Bingkai Pendidikan Ips*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jvykr>
- Susena, F. M. (2001). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.